

PENGARUH JANGKAUAN TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

THE EFFECT OF OUTREACH ON FINANCIAL SUSTAINABILITY OF BPJS KETENAGAKERJAAN

Andri Ronaldo Pasaribu^{*1}, Tanti Novianti^{**}, Dominicus Savio Priyarsono^{**}

^{*})Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Plaza BPJAMSOSTEK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112, Jakarta Selatan 12910, Indonesia

^{**})Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

Abstract: BPJS Ketenagakerjaan has a function to provide social security for employees who work in Indonesia, both Indonesian citizens and foreign citizens, including Indonesian migrant workers. BPJS Ketenagakerjaan participation in Indonesia is mandatory by law, but based on internal data of BPJS Ketenagakerjaan (2021) there are still many workers who have not become participants. Therefore, outreach is needed by BPJS Ketenagakerjaan to implement its function. Where 99,9% of participants and prospective participants are workers who work in micro, small and medium scale enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the effect of outreach on the financial sustainability of BPJS Ketenagakerjaan and to describe whether there is a trade-off or compatible. This study uses secondary data in the form of a cross-section consisting of 122 BPJS Ketenagakerjaan main branch offices in Indonesia in 2018. The analytical method used in this study is the Ordinary Least Square (OLS) method. The outreach carried out by BPJS Ketenagakerjaan has effect on its financial sustainability. It can be concluded that there is a trade-off between outreach and the financial sustainability of BPJS Ketenagakerjaan. This indicates that when BPJS Ketenagakerjaan wants to maintain its financial sustainability, it will reduce the outreach of services and potential participants.

Keywords: outreach, financial sustainability, BPJS ketenagakerjaan, social security, Indonesia

Abstrak: BPJS Ketenagakerjaan ditugaskan untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), termasuk juga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia secara Undang-Undang bersifat wajib, namun berdasarkan data internal BPJS Ketenagakerjaan (2021) masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi peserta sehingga diperlukan jangkauan yang luas dan dalam oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Dimana Peserta dan calon pesertanya BPJS Ketenagakerjaan sebesar 99,9% adalah tenaga kerja yang bekerja pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan mendeskripsikan apakah terjadi *trade-off* atau kompatibel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk cross-section terdiri dari 122 Kantor Cabang Induk (KCI) BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Jangkauan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangannya. Dapat disimpulkan adanya *trade-off* antara jangkauan dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengindikasikan ketika BPJS Ketenagakerjaan ingin mempertahankan keberlanjutan keuangannya maka akan mengurangi jangkauan pelayanan dan calon pesertanya.

Kata kunci: jangkauan, keberlanjutan keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, Indonesia

Riwayat artikel:

Diterima

12 Juli 2022

Revisi

21 Juli 2022

Disetujui

28 Juli 2022

Tersedia online

30 September 2022

This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



¹ Corresponding author:

Email: andri.ronaldopasaribu@bpjsketenagakerjaan.go.id

PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Menurut Spicker (2000), perlindungan sosial di suatu negara diperlukan untuk kesejahteraan penduduknya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditugaskan untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), termasuk juga Pekerja Migran Indonesia (PMI). BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki tugas untuk mengelola aset jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimilikinya. Aset jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat dilakukan pengembangan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan surplus sehingga dapat menambah Aset BPJS Ketenagakerjaan dan memperkuat Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara Undang-Undang bersifat wajib, namun berdasarkan data internal BPJS Ketenagakerjaan (2021) masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi peserta. Berdasarkan perbandingan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021) dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2021) pada tahun 2019, dari total 123.368.672 pekerja yang bekerja pada usaha berskala mikro, kecil, menengah, dan besar hanya 54.967.458 pekerja yang terdaftar, sedangkan dari total 65.471.134 usaha hanya 681.429 usaha yang terdaftar. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan (2021) pada tahun 2019 dari 54.967.458 tenaga kerja, hanya 34.166.257 tenaga kerja yang aktif membayar. Masih terdapat ±57 juta tenaga kerja yang bekerja pada ±64 juta badan usaha yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan ±20 juta peserta yang belum membayar iuran. Jumlah tersebut merupakan potensi yang masih harus terus digali dan dijangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menjangkau potensi tersebut diantaranya adalah kondisi demografi, geografi, dan profil badan usaha di Indonesia. Dari sisi demografi, Indonesia yang pada saat ini sedang mengalami bonus demografi merupakan peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah peserta dan penerimaan iuran.

Dari sisi geografi, Indonesia merupakan negara besar dan kepulauan yang memiliki luas ±7,81 juta km² dan terdiri dari 17.499 pulau. Dari sisi profil badan usaha, Indonesia memiliki 99,9% tenaga kerja yang bekerja pada badan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Hermes *et al.* (2008) aktivitas lembaga keuangan yang memfokuskan pelayanannya kepada usaha kecil dan orang-orang berpenghasilan rendah, dalam banyak kasus merupakan kegiatan yang menimbulkan biaya yang besar, sehingga lembaga keuangan tersebut mengalami kerugian dan terancam tidak berkelanjutan. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang 99,9% tenaganya bekerja pada skala UMKM, dihadapkan juga pada risiko yang dijelaskan oleh Hermes *et al.* (2008). Kinerja lembaga keuangan yang berfokus pada usaha berskala UMKM dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu, kesejahteraan (*welfarist*) dan institusional (Arsyad, 2008). Pendekatan *welfarist* menekankan lebih pentingnya sosialiasi dan jangkauan yang dilakukan dibandingkan dengan keberlanjutan keuangannya, sedangkan pendekatan institusional lebih menekankan bahwa lembaga keuangan tersebut harus fokus pada keberlanjutan keuangannya (Hermes *et al.* 2008). Dari pendekatan *welfarist* BPJS Ketenagakerjaan dapat dikategorikan berhasil jika mampu menjangkau dan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh segmentasi tenaga kerjanya, sedangkan dari pendekatan institusional, BPJS Ketenagakerjaan dapat dikategorikan berhasil jika mampu berkelanjutan keuangan dengan memenuhi pembiayaan seluruh program yang ada serta mendapatkan surplus dari pengembangan yang dilakukan. Kedua pendekatan tersebut merupakan dasar pemikiran adanya kemungkinan *trade-off* antara jangkauan dengan keberlanjutan keuangan (Hermes *et al.* 2008). *Trade-off* yang dimaksud Hermes *et al.* (2008) adalah situasi ketika suatu lembaga keuangan akan mempertahankan keberlanjutan keuangannya justru akan mengurangi jangkauannya. Menurut Morduch (2006) dalam kondisi tertentu keberlanjutan keuangan dan jangkauan mungkin saja kompatibel. Kompetibel yang dimaksud adalah ketika lebih banyak masyarakat berpendapatan rendah dan usaha kecil yang dijangkau justru akan mendorong lembaga keuangan tersebut untuk terus tumbuh dan berkembang, sehingga keberlanjutan keuangannya tercapai.

Menurut Narumon (2016) saat ini keberlanjutan keuangan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan jaminan sosial di seluruh dunia, salah satunya akibat proyeksi penuaan populasi (*aging population*). Indonesia pada saat ini masih menikmati bonus demografi sampai dengan tahun 2030 dan diproyeksikan akan memasuki fase *aging population* pada tahun 2045. Bonus demografi merupakan peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan penerimaan iuran dari peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk persiapan memasuki fase *aging population*. Hal tersebut sejalan dengan Narumon (2016) yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan atau memulihkan keberlanjutan keuangan skema jaminan sosial maka tingkat iuran pasti harus ditingkatkan juga. Wang dan Bohn (2019) merekomendasikan bahwa sistem jaminan pensiun harus memiliki perencanaan dalam jangka panjang, yang independen dan tidak terpengaruh oleh masa jabatan pemerintahan yang biasanya masa jabatannya tidak dalam jangka panjang.

Sistem jaminan sosial setiap negara berbeda sehingga memiliki kondisi, masalah, dan solusi yang berbeda juga. Narumon (2016) menjelaskan bahwa sebagian besar negara telah mempertimbangkan dan melakukan reformasi jaminan sosial untuk mempertahankan atau memulihkan keberlanjutan keuangan sistem jaminan sosial, salah satu cara yang dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah menunda usia pensiun. Menurut Wang dan Bohn (2019) diperlukan kebijakan yang sangat kompleks karena menjaga dan melindungi dana cadangan jaminan pensiun bukanlah hal yang mudah. Phijaisanit (2011) memperkirakan dana jaminan sosial di Thailand akan bangkrut pada tahun 2039, lebih cepat 12 tahun dari perkiraan ILO yang meneliti pada tahun 2003 yaitu tahun 2051. Díaz-Gimenez dan Díaz-Saavedra melakukan penelitian terkait jaminan pensiun di Spanyol pada tahun 2017, kemudian Gómez-Déniz *et al.* pada tahun 2022 dan menemukan bahwa penurunan dana cadangan jaminan sosial sejalan dengan ketidakberlanjutannya sistem jaminan pensiun. Aurilio *et al.* (2022) menyatakan bahwa akibat peningkatan usia kerja di Italia menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan dalam pemberian tunjangan kepada pekerja akibat diagnosis fibrilasi atrium. Chen *et al.* (2017) menemukan bahwa alokasi aset merupakan hal yang penting dari dana cadangan jaminan sosial dan horizon waktu yang panjang berpengaruh positif terhadap alokasi aset dana jaminan pensiun. Lenney *et al.* (2021) melakukan penelitian di Amerika Serikat

dan menemukan bahwa pembayaran manfaat jaminan pensiun merupakan bagian dari perekonomian yang saat ini mendekati tingkat puncaknya pada tahun 2037. Pada dasarnya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 untuk terus berkelanjutan, namun kondisi tersebut tetap membuat BPJS Ketenagakerjaan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Keberlanjutan keuangan bagi lembaga keuangan yang mencari laba biasanya diprosikan dengan pertimbangan efisiensi dan kinerja keuangannya (Churchill, 2019). Dalam penelitian ini, keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan penerimaan iuran, yang sejalan dengan pernyataan Narumon (2016) dan Pikus *et al.* (2018) yaitu, untuk mempertahankan atau memulihkan keberlanjutan keuangan skema jaminan sosial maka tingkat iuran pasti harus ditingkatkan serta mampu memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. BPJS Ketenagakerjaan yang juga merupakan lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada profit (nirlaba) menggunakan pendekatan yang sejalan dengan Weerawardena *et al.* (2010), Okorley *et al.* (2012), Iwu *et al.* (2015), Omeri (2015), dan Gajdova (2018).

Pembahasan mengenai jangkauan dan keberlanjutan keuangan masih terbatas dengan hasil yang beragam. Hermes (2008), Narumon (2016), Sheremenko *et al.* (2020), dan Ebenezer *et al.* (2020) menemukan bahwa jangkauan yang dilakukan lembaga keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangannya atau dengan kata lain terdapat *trade-off*. Morduch (2006), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019) menemukan bahwa jangkauan yang dilakukan lembaga keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangannya atau dengan kata lain terdapat kompatibel.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan mendeskripsikan apakah terjadi *trade-off* atau kompatibel. Pengaruh jangkauan terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting, mengingat semua negara fokus dengan keberlanjutan keuangan jaminan sosialnya serta dinamika yang terjadi pada demografi saat ini. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian terkait hal tersebut belum pernah dilakukan. Di Indonesia,

penelitian mengenai jangkauan dan keberlanjutan keuangan masih terbatas pada lembaga keuangan mikro dan lembaga non-profit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah Republik Indonesia, dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk *cross-section* terdiri dari 122 Kantor Cabang Induk (KCI) BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data tahun 2018 pada posisi 31 Desember 2018 pukul 23:59. Sumber data diperoleh dari internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan sebagai variabel terikat menggunakan variabel total jumlah iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut sejalan dengan Narumon (2016) yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan atau memulihkan keberlanjutan keuangan skema jaminan sosial maka tingkat iuran pasti harus ditingkatkan juga. Variabel independen yang digunakan terbagi menjadi tiga cakupan jangkauan yaitu, jangkauan pelayanan, jangkauan kepesertaan, dan jangkauan calon peserta. Ketiga cakupan jangkauan tersebut mengacu pada Yaron *et al.* (1997), Chelangat dan Sang (2018) dan Bowman (2011) mengenai skala (*scale*) dan kedalaman (*depth*) jangkauan yang dilakukan serta tujuan dan struktur dari lembaga keuangannya. Jangkauan pelayanan menggunakan variabel jumlah kasus yang ditangani dan jumlah nominal klaim yang dibayarkan, jangkauan kepesertaan menggunakan variabel jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar, dan jangkauan calon peserta menggunakan variabel jumlah badan usaha yang baru terdaftar. Konsep, pengukuran, dan referensi penggunaan variabel penelitian sebagaimana Tabel 1.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi penelitian dari Sheremenko (2016), Chelangat dan Sang (2018), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019), dan Ebenezer *et al.* (2020). Penelitian-penelitian tersebut juga menggunakan analisis regresi untuk mengetahui apakah variabel-variabel jangkauan sebagai variabel independen memiliki pengaruh

pengaruh baik positif maupun negatif terhadap variabel keberlanjutan keuangan sebagai variabel dependen. Persamaan matematis dalam penelitian ini, yaitu:

$$IURAN = \beta_0 + \beta_1 KASUS + \beta_2 KLAIM + \beta_3 AKTIF + \beta_4 BARU + \epsilon$$

Dimana: β_0 (Konstanta); β_1, \dots, β_4 (Koefisien); ϵ (faktor lain yang tidak diteliti)

Menguji kebermaknaan (*test of significance*) secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi.

H_0 : tidak terdapat pengaruh KASUS, KLAIM, AKTIF, dan BARU terhadap IURAN

H_1 : terdapat pengaruh KASUS, KLAIM, AKTIF, dan BARU terhadap IURAN

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), dimana jika kriteria tersebut dipenuhi maka model regresi dapat digunakan sebagai estimator yang dapat dipercaya dan handal karena tidak bias, konsisten, berdistribusi normal, dan juga efisien. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan diantaranya adalah uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan program Stata/MP 14 dalam pengolahan datanya. Dalam penelitian ini seluruh variabel yang mewakili jangkauan (KASUS, KLAIM, AKTIF, dan BARU) secara signifikan harus berpengaruh positif terhadap variabel yang mewakili keberlanjutan keuangan (IURAN) untuk mengindikasikan adanya hubungan kompatibel antara jangkauan dan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Namun apabila ada salah satu variabel yang mewakili jangkauan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap variabel yang mewakili keberlanjutan keuangan maka diindikasikan adanya *trade-off* antara jangkauan dan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel yang mewakili jangkauan ($\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ dan β_4) bernilai negatif atau dengan kata lain memiliki pengaruh negatif terhadap variabel yang mewakili keberlanjutan keuangan (IURAN), sehingga terdapat *trade-off* antara jangkauan dengan keberlanjutan keuangannya.

Tabel 1. Konsep dan pengukuran variabel penelitian

Variabel	Pengukuran	Referensi
IURAN	Merupakan proksi dari keberlanjutan keuangan. IURAN adalah jumlah iuran yang diterima oleh setiap kantor cabang induk BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018. Jumlah iuran ini merupakan jumlah total iuran dari empat program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dalam satuan miliar Rupiah. Data ini merupakan data pada 1 Januari 2018 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 23:59.	Narumon (2016), Chelangat dan Sang (2018), Pikus <i>et al.</i> (2018), Ebenezer <i>et al.</i> (2020).
KASUS	Merupakan proksi dari jangkauan pelayanan. KASUS adalah jumlah kasus yang ditangani oleh setiap kantor cabang induk BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kasus ini merupakan jumlah total kasus dari empat program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dalam satuan klaim. Data ini merupakan data pada 1 Januari 2018 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 23:59.	Yaron <i>et al.</i> (1997), Ledgerwood (1999), Schreiner (2002), Hermes <i>et al.</i> (2008), Arsyad (2008), Sheremenko <i>et al.</i> (2016), Churchill (2019), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019).
KLAIM	Merupakan proksi dari jangkauan pelayanan. KLAIM adalah jumlah nominal klaim yang dibayarkan oleh setiap kantor cabang induk BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Jumlah nominal klaim ini merupakan jumlah total nominal klaim dari empat program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dalam satuan miliar Rupiah. Data ini merupakan data pada 1 Januari 2018 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 23:59.	Yaron <i>et al.</i> (1997), Ledgerwood (1999), Schreiner (2002), Hermes <i>et al.</i> (2008), Arsyad (2008), Sheremenko <i>et al.</i> (2016), Churchill (2019), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019).
AKTIF	Merupakan proksi dari jangkauan kepesertaan. AKTIF adalah jumlah tenaga kerja yang aktif terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga kerja aktif ini merupakan tenaga kerja penerima upah dari badan usaha yang minimal terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dalam satuan orang. Data ini merupakan data pada 1 Januari 2018 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 23:59.	Yaron <i>et al.</i> (1997), Ledgerwood (1999), Schreiner (2002), Hermes <i>et al.</i> (2008), Arsyad (2008), Sheremenko <i>et al.</i> (2016), Churchill (2019), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019).
BARU	Merupakan proksi jangkauan calon peserta. BARU adalah jumlah badan usaha yang baru terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Badan usaha yang baru terdaftar ini merupakan badan usaha yang minimal mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dalam satuan badan usaha/perusahaan. Data ini merupakan data pada 1 Januari 2018 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2018 pukul 23:59.	Yaron <i>et al.</i> (1997), Ledgerwood (1999), Schreiner (2002), Hermes <i>et al.</i> (2008), Arsyad (2008), Sheremenko <i>et al.</i> (2016), Churchill (2019), Henock (2019), Mekonnen dan Zewudu (2019).

HASIL

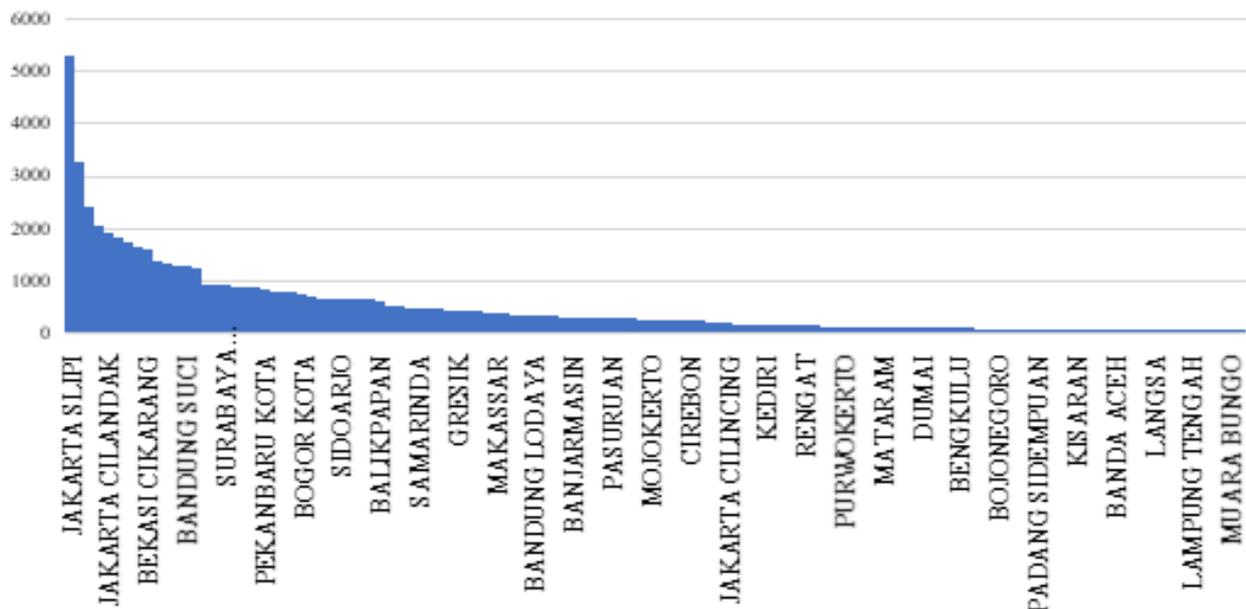
Berdasarkan Gambar 1, lima kantor cabang (KC) tertinggi yang menerima iuran adalah kantor cabang yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, yaitu KC Jakarta Slipi, KC Jakarta Menara Jamsostek, KC Jakarta Kebon Sirih, KC Jakarta Grogol, dan KC Jakarta Cilandak. Urutan teratas ditempati oleh KC Jakarta Slipi dengan jumlah penerimaan iuran sebesar 5.290 miliar Rupiah. Lima kantor cabang terendah yang menerima iuran adalah KC Madura sebesar 24 miliar Rupiah, KC Muara Bungo sebesar 33 miliar Rupiah, KC Lhokseumawe sebesar 33 miliar Rupiah, KC Sumedang sebesar 36 miliar Rupiah, dan KC Blitar sebesar 37 miliar Rupiah.

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan tiga kantor cabang tertinggi yang menangani kasus (klaim) adalah kantor cabang yang terletak di Provinsi Jawa Barat, yaitu KC Depok, KC Bogor Kota, dan KC Bandung Suci. Urutan teratas ditempati oleh KC Depok dengan jumlah klaim yang ditangani sebanyak 37.709 kasus. Tiga kantor cabang terendah yang menangani kasus adalah KC Kotabaru sebanyak 1.535 kasus, KC Meulaboh sebanyak 1.898 kasus, dan KC Ternate sebanyak 2.190 kasus. Tiga kantor cabang tertinggi yang membayarkan klaim kepada penerima manfaat terletak di bagian barat pulau Jawa dengan masing-masing klaim yang dibayarkan berada lebih besar dari 500 miliar Rupiah. KC Jakarta Slipi berada di urutan pertama dengan jumlah sebesar 977 miliar Rupiah,

urutan kedua KC Jakarta Menara Jamsostek sebesar 566 miliar Rupiah, dan urutan ketiga KC Tangerang Selatan 528 miliar Rupiah. Tiga kantor cabang terendah yang membayarkan klaim adalah KC Kotabaru sebesar 11 miliar Rupiah, KC Muara Bungo sebesar 17 miliar Rupiah, dan KC Meulaboh sebesar 20 miliar Rupiah.

Berdasarkan Gambar 2 tiga kantor cabang tertinggi yang memiliki tenaga kerja penerima upah (TKPU) aktif didominasi oleh kantor cabang yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, yaitu KC Jakarta Slipi, KC Jakarta Menara Jamsostek, dan KC Jakarta Grogol. Urutan teratas ditempati oleh KC Jakarta Slipi dengan jumlah 676.461 pekerja. Tiga kantor cabang terendah yang memiliki TKPU aktif adalah KC Kotabaru

sebanyak 9.754 pekerja, KC Madura sebanyak 16.819 pekerja, dan KC Muara Bungo sebanyak 18.873 pekerja. Tiga kantor cabang tertinggi yang memiliki badan usaha yang baru terdaftar terletak di tiga provinsi berbeda. Urutan pertama ditempati oleh KC Medan Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 8.264 badan usaha, urutan kedua KC Jakarta Grogol yang terletak di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 3.617 badan usaha, dan urutan ketiga KC Semarang Pemuda yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 3.475 badan usaha. Tiga kantor cabang terendah yang memiliki badan usaha yang baru terdaftar adalah KC Muara Enim sebanyak 259 badan usaha, KC Kotabaru sebanyak 371 badan usaha, dan KC Madiun sebanyak 417 badan usaha.



Gambar 1. Penerimaan Iuran Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018

No.	Nama Kantor Cabang	Klaim (Kasus)	No.	Nama Kantor Cabang	Nominal Klaim (miliar Rupiah)
1	Depok	37.709	1	Jakarta Slipi	977
2	Bogor Kota	36.412	2	Jakarta Menara Jamsostek	566
3	Bandung Suci	34.408	3	Tangerang Selatan	528
...
120	Ternate	2.190	120	Meulaboh	20
121	Meulaboh	1.898	121	Muara Bungo	17
122	Kotabaru	1.535	122	Kotabaru	11

No.	Nama Kantor Cabang	Tenaga Kerja PU Aktif	No.	Nama Kantor Cabang	Badan Usaha Baru
1	Jakarta Slipi	676.461	1	Medan Kota	8.264
2	Jakarta Menara Jamsostek	434.932	2	Jakarta Grogol	3.617
3	Jakarta Grogol	383.708	3	Semarang Pemuda	3.475
...
120	Muara Bungo	18.873	120	Madiun	417
121	Madura	16.819	121	Kotabaru	371
122	Kotabaru	9.754	122	Muara Enim	259

Gambar 2. Tiga kantor cabang BPJS ketenagakerjaan terendah dan tertinggi dalam jumlah kasus, nominal klaim, tenaga kerja aktif, dan badan usaha baru

Dalam penelitian ini, uji normalitas residual menggunakan uji skewness kurtosis yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. *Adjusted Chi2* sebesar 16,55 dan *Probability>Chi2* sebesar 0,0003. Hasil Uji Skewness Kurtosis kurang dari nilai probabilitas 0,05 yang mengindikasikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Menurut Gujarati (2003), apabila uji normalitas memberikan hasil bahwa yang digunakan dalam penelitian ini cenderung tidak normal maka dapat digunakan asumsi *Central Limit Theorem* yaitu jika jumlah data penelitian cukup banyak ($n > 30$) maka asumsi normalitas dapat diabaikan.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, dimana dalam uji tersebut *absolute residual* menjadi variabel dependen yang kemudian diregresikan dengan variabel independen

dalam penelitian ini, yaitu KASUS, KLAIM, AKTIF, dan BARU. Berdasarkan Tabel 3 di atas nilai $P > |t|$ dari KASUS sebesar 0,562, KLAIM sebesar 0,182, AKTIF sebesar 0,168, dan BARU sebesar 0,344, dimana berarti seluruh nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan dalam data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji glejser maka data ini telah memenuhi uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang terakhir yang dilakukan adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari KLAIM sebesar 6,93, AKTIF sebesar 6,04, KASUS sebesar 2,37, dan BARU sebesar 1,44. Dimana nilai tersebut seluruhnya lebih kecil dari 10, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 2. Uji Skewness Kurtosis

Variable	Skewness/Kurtosis tests for Normality			----- joint -----	
	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	Adj chi ² (2)	Prob>chi ²
res	122	0,0073	0,0003	16,55	0,0003

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	122
Model	284768,612	4	71192,153	F (4, 117)	=	8,08
Residual	1030384,63	117	8806,70626	Prob > F	=	0,0000
				R-squared	=	0,2165
				Adj R-squared	=	0,1897
Total	1315153,24	121	10869,0351	Root MSE	=	93,844
abs_res	Coef.	Std. Err.	t	P > t	Beta	
KASUS	-,0008208	,0014131	-0,58	0,562	-,0732402	
KLAIM	,1983728	,1477505	1,34	0,182	,2891629	
AKTIF	,0002669	,0001924	1,39	0,168	,278995	
BARU	-,0098292	,0103476	-0,95	0,344	-,0932445	
_cons	58,89967	18,09105	3,26	0,001	.	

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
KASUS	6,93	0,144364
KLAIM	6,04	0,165600
AKTIF	2,37	0,421225
BARU	1,44	0,694946
Mean VIF	4,19	18,09105

Cara lain untuk memastikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 1/VIF. Dimana jika 1/VIF lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 4, nilai 1/VIF dari KLAIM sebesar 0,144364, AKTIF sebesar 0,165600, KASUS sebesar 0,421225, dan BARU sebesar 0,694946. Dimana nilai tersebut seluruhnya lebih besar dari 0,01, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka data ini telah memenuhi uji asumsi klasik.

Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Dimana model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai estimator yang dapat dipercaya dan handal.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dinilai *Goodness of Fit* suatu model berdasarkan koefisien determinasi, Uji Statistik F, dan Uji Statistik t. Menurut Ghazali (2018), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah 0,9564, berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,64%. Maka sisanya yaitu $100\% - 95,64\% = 4,36\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Dalam Ghazali (2018) juga dijelaskan bahwa kelamahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tanpa peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen. Menurut Ghazali (2018) banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Berdasarkan tabel 5, nilai Adjusted R^2 adalah sebesar 0,9549. Dimana semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 95,49%. Maka sisanya yaitu $100\% - 95,49\% = 4,51\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

Berdasarkan Tabel 5, didapat nilai F hitung sebesar 641,51 dengan probabilitas 0,0000. Dimana jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi jumlah iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya maka hasil estimasi di atas adalah terima H_1 dan tolak H_0 . Dengan kata lain, jumlah kasus yang ditangani (KASUS), jumlah klaim yang dibayarkan (KLAIM), jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar (AKTIF), dan jumlah badan usaha yang baru terdaftar (BARU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan (IURAN). Hasil tersebut menjelaskan bahwa jangkauan kepesertaan, pelayanan, dan calon peserta secara signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, seluruh variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel IURAN dipengaruhi oleh variabel KASUS, KLAIM, AKTIF, dan BARU. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	122
				F (4, 117)	=	641,51
Model	56771748,6	4	14192937,2	Prob > F	=	0,0000
Residual	2588531,49	117	22124,2008	R-squared	=	0,9564
				Adj R-squared	=	0,9549
Total	59360280,1	121	490580,827	Root MSE	=	148,74
IURAN	Coef.	Std. Err.	t	P > t		Beta
KASUS	-,0311771	,0022397	-13,92	0,000		-,4140637
KLAIM	2,401639	,2341834	10,26	0,000		,5210847
AKTIF	,0051224	,0003049	16,80	0,000		,7970164
BARU	-,085276	,0164009	-5,20	0,000		-,1204121
_cons	-31,1712	28,67417	-1,09	0,279		.

$$\text{IURAN} = -31,17 - 0,031 \text{ KASUS} + 2,401 \text{ KLAIM} + 0,005 \text{ AKTIF} - 0,085 \text{ BARU}$$

Konstanta sebesar $-31,17$ menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata IURAN yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah $-31,17$ miliar Rupiah. Koefisien regresi KASUS sebesar $-0,031$ menyatakan bahwa setiap penambahan kasus yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1.000 kasus akan menurunkan penerimaan IURAN yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 31 miliar Rupiah. Koefisien regresi KLAIM sebesar 2,401 menyatakan bahwa setiap penambahan KLAIM yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1 miliar akan meningkatkan penerimaan IURAN yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,401 miliar Rupiah. Koefisien regresi AKTIF sebesar 0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan tenaga kerja AKTIF sebesar 1.000 peserta akan meningkatkan penerimaan IURAN yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5 miliar Rupiah. Koefisien regresi BARU sebesar 0,085 menyatakan bahwa setiap penambahan badan usaha BARU sebesar 1.000 badan usaha akan menurunkan penerimaan IURAN yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 85 miliar Rupiah.

Variabel jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar (AKTIF) sebagai proksi jangkauan kepesertaan memiliki pengaruh positif terhadap variabel jumlah iuran yang diterima (IURAN). Dengan demikian jika jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar meningkat maka jumlah iuran yang diterima akan meningkat. Hal tersebut mengindikasikan antara jangkauan kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan keuangannya terdapat *compatibility*. Dengan kata lain, peningkatan kepesertaan yang sudah terdaftar (*existing*) mendorong tercapainya keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini juga menunjukkan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh iuran dari kegiatannya sebagai lembaga pemberi perlindungan sosial ketenagakerjaan yang 99,9% pesertanya berada pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Variabel jumlah badan usaha yang baru terdaftar (BARU) sebagai proksi jangkauan calon peserta memiliki pengaruh negatif terhadap variabel jumlah iuran yang diterima (IURAN). Dengan demikian jika jumlah badan usaha yang baru terdaftar meningkat maka

jumlah iuran yang diterima akan menurun. Hal tersebut mengindikasikan terdapat *trade-off* antara jangkauan calon peserta yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan keuangannya. Dengan kata lain, perluasan calon peserta yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat menghambat dan mengancam keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Variabel jumlah kasus yang ditangani (KASUS) dan jumlah klaim yang dibayarkan (KLAIM) sebagai proksi jangkauan pelayanan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap variabel jumlah iuran yang diterima (IURAN). Variabel jumlah klaim yang dibayarkan memiliki pengaruh positif sedangkan variabel jumlah kasus yang ditangani memiliki pengaruh negatif. Dimana jika jumlah klaim yang dibayarkan meningkat maka jumlah iuran yang diterima akan meningkat, sebaliknya jika jumlah kasus yang ditangani meningkat maka jumlah iuran yang diterima akan menurun. Pengaruh positif variabel jumlah klaim yang dibayarkan terhadap variabel jumlah iuran yang diterima menunjukkan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk membayarkan setiap klaim yang diajukan sangat baik atau dengan kata lain BPJS Ketenagakerjaan memiliki Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang likuid. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa jika jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan meningkat maka jumlah iuran yang diterima juga akan meningkat. Dimana jika semakin likuid Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) peserta untuk membayar iurannya dan calon peserta untuk menjadi peserta sehingga berujung pada peningkatan jumlah iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut mengindikasikan jika terjadi peningkatan jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka akan mendorong keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Pengaruh negatif variabel jumlah kasus yang ditangani terhadap variabel jumlah iuran yang diterima berarti jika jumlah kasus yang ditangani meningkat maka akan menurunkan jumlah penerimaan iuran. Dengan kata lain, peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat menghambat dan mengancam keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut mengindikasikan terdapat *trade-off* antara jangkauan pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan keuangannya. Dengan kata lain, pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat menghambat dan mengancam keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Jangkauan yang mencakup jangkauan pelayanan, jangkauan kepesertaan, dan jangkauan calon peserta, memiliki pengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, dengan kata lain adanya *trade-off* antara jangkauan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan keberlanjutan keuangannya. Hal ini mengindikasikan ketika BPJS Ketenagakerjaan ingin mencapai dan mempertahankan keberlanjutan keuangannya maka akan mengurangi jangkauannya. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermes (2008), Narumon (2016), Sheremenko *et al.* (2020), dan Ebenezer *et al.* (2020), dimana dalam penelitiannya dinyatakan bahwa aktivitas lembaga keuangan yang fokus pelayanannya kepada usaha kecil dan orang-orang yang berpenghasilan rendah, dalam banyak kasus merupakan kegiatan yang menimbulkan biaya yang besar, sehingga lembaga keuangan tersebut mengalami kerugian dan terancam tidak berkelanjutan.

Implikasi Manajerial

Manajemen memerlukan strategi untuk menjangkau seluruh tenaga kerja di Indonesia yang berbasis pada *roadmap* yang terarah dengan memperhatikan potensi iuran dari setiap kabupaten dan kotamadya di seluruh wilayah Indonesia. Manajemen perlu untuk melakukan kajian dan evaluasi untuk meminimalisir risiko dari adanya ancaman keberlanjutan keuangan dari penjangkauan yang dilakukan. Manajemen memerlukan peningkatan sosialisasi dan pengadaan infrastruktur dalam menyelesaikan klaim yang diajukan oleh penerima manfaat. Manajemen harus berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan promotif dan preventif yang bekerja sama dengan instansi terkait ketenagakerjaan untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh pekerja khususnya kecelakaan dan kematian akibat bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jangkauan yang mencakup jangkauan pelayanan, jangkauan kepesertaan, dan jangkauan calon peserta, memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan pelayanan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi *trade-off* antara jangkauan pelayanan dengan keberlanjutan keuangan

BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan kepesertaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi kompatibel antara jangkauan kepesertaan dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan calon peserta berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan maka terjadi *trade-off* antara jangkauan calon peserta dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Jangkauan berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang berarti terjadi *trade-off* antara jangkauan dengan keberlanjutan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika BPJS Ketenagakerjaan ingin mencapai dan mempertahankan keberlanjutan keuangannya maka akan mengurangi jangkauannya.

Saran

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia harus terus memperluas dan memperdalam jangkauannya untuk meningkatkan jumlah penerimaan iuran. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kajian dan evaluasi untuk meminimalisir risiko dari adanya ancaman keberlanjutan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan juga memerlukan kerjasama antar lembaga terkait untuk membuat kebijakan terkait strategi penjangkauan yang berdasar pada *roadmap* yang terarah baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel di luar internal BPJS Ketenagakerjaan. Diantaranya tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan jumlah angkatan kerja. Untuk penelitian berikutnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan objek penelitian berbeda, yaitu seperti Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kedua lembaga ini sama-sama menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia namun memiliki segmentasi yang berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad L. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Keberlanjutan keuangan, dan Sustainability*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Aurilio MT, Mennini FS, Nardone C, Piccioni A, Bolcato M, Russo V, Sciannamea V, Migliorini R, Coppeta L, Magrini A. 2022. Health and economic impact of atrial fibrillation of workers in Italy: Social security benefits. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(3):1883-1891.
- Bowman W. 2011. Financial capacity and sustainability of ordinary non-profits. *Nonprofit Management and Leadership* 22(1):37-51.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal 2015 – 2020: Survei Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta: BPS.
- Chelangat V, Sang PK. 2018. Financial Monitoring and Evaluation on Financial Sustainability of Public Governance Non- Governmental Organizations in Nairobi County, Kenya. *International Journal of Current Aspects* 2(5):29-36.
- Chen Y, Sun X, Li J. 2017. Pension funds asset allocation: A mean-variance model with CVaR constraints. *Procedia Computer Science* 108:1302–1307.
- Churchill, Sefa A. 2019. Microfinance financial sustainability and outreach: is there a trade-off?. *Journal of Economic Literature* 59:1329-1350.
- Díaz-Gimenez, Javier, Díaz-Saavedra J. 2017. The future of Spanish pensions. *Pension Economics and Finance* 16(2):33–65.
- Ebenezer, Adjei A, Musah A, Ahmed IA. 2020. Determinants of financial sustainability of non-governmental organizations (NGOs) in Ghana. *Journal of Accounting and Management* 10(1):60-79.
- Gajdova D, Majdúchová H. 2018. Financial Sustainability criteria and their testing in the conditions of the slovak non-profit sector. *Journal of Economic Literature* 12:33-56.
- Ghozali I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gómez-Déniz E, Pérez-Rodríguez JV, Sosvilla- Rivero S. 2022. Analyzing how the social security reserve fund in Spain affects the sustainability of the pension system. *International Journal of Risks* 10(6)120-137.
- Henock, Melesse S. 2018. financial sustainability and outreach performance of saving and credit cooperatives: The case of Eastern Ethiopia. *Asia Pacific Management Review* 24(2019):1-9.
- Hermes N, Lensink R, Meesters A. 2008. Outreach and efficiency of microfinance institutions. *Journal of Economic Literature*.
- [ILO] International Labour Organization. Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Iwu CG, Kapondoro L, Twum-Darko M, Tengeh R. 2015. Determinants of sustainability and organizational effectiveness in non-profit organisations. *Sustainability* 7(7):9560-9573.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2015 – 2019 di Indonesia*. Data UMKM.
- Ledgerwood J. 1999. *Microfinance Book: Sustainable Banking with the Poor*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Lenney J, Finn S, Byron L, Louise S. 2021. *The sustainability of state and local pensions: A public finance approach*. In *Brookings Papers on Economic Activity*. Berlin and Heidelberg: Springer.
- Morduch, Jonathan J. 2006. Smart Subsidies. *Journal of Microfinance / ESR Review* 8:10-17.
- Narumon S. 2016. Sustainable Social Security Systems: A Case Study from Thailand. *Journal of Social, Political, and Economic Studies* 41(3):29-50.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. *Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Okorley E, Deh J, Owusu R. 2012. A Ghanaian case study of strategies of ensuring accountability by nongovernmental organisations. *Journal of Sustainable Development in Africa* 14(7):43-54.
- Omeri KL. 2015. Factors influencing the sustainability of Non-governmental organizations: A survey of NGOs in Nakuru County, Kenya. *Journal of Economics, Commerce and Management*

3(9):704-744.

- Phijaisanit E. 2011. Thai social security pension fund: An Analysis of Sustainability and Intergenerational Fairness (in Thai). *Applied Economics Journal* 18(2):32-44.
- Pikus R, Prykaziuk N, Balytska M. 2018. Financial sustainability management of the insurance company: Case of Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations* 15(4):219-228.
- Schreiner M. 2002. Aspects of outreach: A framework for discussion of the social benefits of microfinance. *Journal of International Development* 14:591–603.
- Sheremenko G, Escalente Cesar L, Florkowski Wojciech J. 2016. Financial sustainability and poverty outreach: The case of microfinance institutions in Eastern Europe and Central Asia. *European Journal of Development Research* 29:230–245.
- Spicker P. 2000. *The Welfare State: A General Theory*. California: Sage Publications.
- Wang X, Bohn F. 2019. Pension reserve fund, political budget cycles and fiscal illusion. *European Journal of Political Economy* 56:62–73.
- Weerawardena J, McDonald RE, Mort GS. 2010. Sustainability of nonprofit organizations: An empirical investigation. *Journal of World Business* 45(4):346–356.
- World Bank. 2019. *Penduduk Usia Produktif dan Usia Tidak Produktif di Indonesia Tahun 1960–2019: World Development Indicators*. Washington DC: World Bank.
- Yaron Y, Benjamin Mc. D, Piprek G. 1997. *Rural finance: Issues, design, and best practice. Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs Series 15*. Washington DC: The World Bank.
- Zewudu T, Mekonnen, Gashaw B. 2019. Effects of outreach on financial sustainability of ethiopian micro finance institutions. *Splint International Journal of Professionals* 6(2)19-31.